

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan suatu negara kearah yang lebih baik tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah dalam menata system pemerintahannya agar tercipta suatu pembangunan yang merata, efektif, efisien, dan transparansi serta dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan menjalankan pemerintahan dan masing-masing daerah yang ada di wilayah Indonesia ditopang oleh adanya desa yang ikut ambil andil dalam menjaga kestabilan pelaksanaan pemerintahan (Juliantari, 2018). Dalam masyarakat daerah Bali, terdapat dua bentuk pemerintahan desa yang masing-masing memiliki fungsi, tugas, dan struktur organisasi yang berbeda. Kedua bentuk tersebut yaitu desa dinas dan desa adat atau desa *pakraman*. Desa dinas itu sendiri merupakan suatu organisasi yang mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan seperti pembuatan KTP, sedangkan desa adat atau desa *pakraman* merupakan suatu organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali (Andreadhi, 2017).

Lingkup desa *pakraman* tidak terbatas pada peran-peran sosial budaya dan keagamaan, melainkan juga ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya berasal dari pemerintah. Dari banyaknya beban yang dipikul oleh desa *pakraman*

terdapat besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh desa pakraman, tetapi ironisnya pembiayaan desa *pakraman* berada diluar kebijakan pembiayaan pemerintah. Kebijakan pembiayaan pemerintah hanya terbatas sampai desa saja, sedangkan desa *pakraman* juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Desa *pakraman* dituntut untuk memiliki tata kelola perekonomian mandiri, Salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Provinsi Bali adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di banyak desa (Parmawan, 2017).

Lembaga Perkreditan Desa merupakan badan usaha keuangan milik desa *pakraman* yang melakukan kegiatan operasionalnya di lingkungan desa pakraman untuk melayani masyarakat desa setempat. LPD bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi pada masyarakat desa melalui pemberian kredit maupun simpanan dalam bentuk tabungan (Putra, 2018). Peran LPD sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pentingnya peranan LPD bagi masyarakat, maka pengurus atau pengelola LPD harus meningkatkan produktivitasnya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya (Wijayanti, 2012). LPD pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, peranan badan pengawas LPD yang dimulai dari prajuru desa diharapkan dapat meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengurus LPD dalam mengelola kegiatan operasi LPD tersebut. Khususnya pada Kabupaten Tabanan dilihat dari perkembangan Lembaga Perkreditan Desa hingga bulan Mei 2021 berjumlah 308 LPD yang tersebar di 10 Kecamatan.

Tabel 1.1
Perkembangan LPD di Kabupaten Tabanan

Kecamatan	Penilaian LPD				
	Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet
Baturiti	23	7	5	0	9
Kediri	7	7	5	2	0
Marga	12	6	5	0	5
Penebel	29	9	11	5	13
Kerambitan	11	8	3	4	1
Pupuan	16	4	1	1	2
Selemadeg	15	1	5	1	6
Selemadeg Barat	11	6	7	4	2
Selemadeg Timur	14	3	3	0	7
Tabanan	6	3	2	1	1
Jumlah	144	54	47	18	46

Sumber : LPLPD Kabupaten Tabanan 2021

Dilihat dari perkembangan LPD yang ada di Kabupaten Tabanan, Kecamatan yang tidak terdapat LPD macet adalah Kecamatan Kediri disusul oleh Kecamatan Tabanan dengan terdapat 1 LPD macet sedangkan Kecamatan dengan LPD macet paling banyak adalah Kecamatan Penebel dengan 13 LPD macet. Salah satu penyebab macetnya LPD tersebut antara lain karena adanya tindakan kecurangan dari pengurus LPD tersebut. Itu terbukti dari adanya kasus-kasus yang muncul, berikut adalah kasus kecurangan LPD Di Kabupaten Tabanan.

Tabel 1.2
Kasus Kecurangan LPD di Kabupaten Tabanan

No	Kasus Kecurangan	Taksiran Kerugian
1	<p>Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana LPD Desa Pakraman Batungsel Kecamatan Pupuan sekira Tahun 2009 sampai dengan 2017 yang dilakukan oleh kolektor LPD atas nama I Made Kartayasa.</p> <p>https://kejari-tabanan.go.id/berita/detail/206#</p>	Rp.913,022,734
2	<p>Kasus yang terjadi di Kecamatan Penebel atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua LPD Desa Adat Sunantaya yakni I Gede Ketut Sukerta yang mencuat pada tahun 2017, dimana pada saat itu para nasabah tidak bisa menarik tabungan di LPD. Modusnya dana LPD dijadikan pinjaman kredit, dimana kredit tersebut fiktif atas nama dia sendiri dan tanpa anggunan.</p> <p>https://balitribune.co.id/content/kejari-tabanan-tahan-ketua-lpd-sunantaya</p>	Rp 1, 223 miliar

3	<p>Kasus penyelewengan dana LPD oleh pengurus yakni ketua, sekretaris, dan bendahara yang terjadi pada LPD Desa Adat Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Akibatnya masyarakat mengeluh karena uang yang mereka tabung di LPD tidak bisa ditarik.</p> <p>https://balitribune.co.id/content/dana-lpd-desada-adat-belumbang-rp-13-miliar-diselewengkan</p>	Rp 1,3 Miliar
---	---	---------------

Sumber : Data diolah,2021

Perilaku kecurangan dapat dijelaskan dengan *Fraud Triangle Theory* yang pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953), seseorang melakukan kecurangan karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Hal ini dapat dicegah salah satunya dengan penerapan *internal kontrol* atau pengendalian internal yang baik. Dalam Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Kelley (1967), kemudian Green serta Mitchell (1979) membahas tentang penyebab-penyebab perilaku seseorang dan upaya untuk memahami penyebab dibalik perilaku seseorang. Menurut Schuchter & Levi (2016) teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu. Sebab perilaku untuk melakukan kecurangan terjadi karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal.

Pengendalian Internal diindikasikan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Teori yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah *fraud triangle theory*. Pengendalian internal yang rendah dan kepatuhan

karyawan terhadap pengendalian internal yang juga rendah dapat menjadi peluang melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi. Sebelum memanfaatkan peluang yang ada, *fraudster* harus memastikan bahwa aktivitas *fraud*-nya tidak akan terdeteksi oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti memproksikan faktor peluang (*opportunity*) pada variabel Pengendalian Internal. Terdapat lima komponen kerangka Pengendalian Internal COSO (Elder, 2012) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Pengendalian Internal yang efektif adalah keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan instansi yang berkaitan dengan menjaga keandalan penyajian laporan keuangan, efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hasil penelitian (Lestari, 2017) bahwa adanya pengawasan dan evaluasi atas aktivitas-aktivitas operasional secara terus-menerus dalam instansi dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi dan (Parmawan, 2017) *Internal control* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) Hal ini berarti apabila *internal control* meningkat, maka kecenderungan kecurangan (*fraud*) akan semakin menurun. Sedangkan dalam penelitian Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor yang diindiasikan mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi selanjutnya yaitu Integritas. Menurut Schlenker (2008) dalam Lestari (2017) menyebutkan bahwa integritas adalah suatu komitmen pribadi yang teguh terhadap prinsip ideologi yang etis dan menjadi bagian dari konsep diri yang ditampilkan melalui perilakunya. Integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan

transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam *fraud treangle theory* menjelaskan, seorang yang memiliki integritas tinggi tidak akan mempengaruhi pekerjaan mereka walaupun terdapat tekanan(*pressure*) dan kesempatan(*opportunity*) untuk melakukan kecurangan (Lestari, 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anggara (2020) Integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa jika Integritas semakin meningkat maka kecurangan akuntansi akan menurun dan penelitian Dewi (2017) bahwa integritas berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas seseorang menyebabkan semakin rendah tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Selain pengendalian internal dan integritas, proteksi *Awig-awig* juga diindikasikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam *fraud triangle theory*, tekanan/*pressure* merupakan faktor pendorong pelaku kecurangan untuk melakukan kecurangan. Dalam penelitian ini tekanan/*pressure* dijadikan proksi pada variabel proteksi *awig-awig*, pelaksanaan *awig-awig* lemah akan menimbulkan tekanan/*pressure* untuk melakukan kecurangan akan meningkat. LPD yang termasuk dalam desa *pakraman* atau desa adat juga patuh terhadap adanya *Awig-awig* atau hukum adat yang disepakati bersama. *Awig-awig* desa adat merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya (Kurniawan, 2015). Sejalan dengan penelitian Parmawan (2017), bahwa dengan adanya perlindungan atau proteksi *awig-awig* desa *pakraman* yang kuat, nantinya akan dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain dan dari penelitian Utami

(2019), dengan proteksi *awig-awig* yang kuat, akan dapat melindungi baik operasional maupun masyarakat dalam hal ini yaitu nasabah di LPD dengan sanksi yang dimiliki, sehingga tindakan kecurangan akan sulit dilakukan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Utami (2019). Adapun perbedaan penelitian ini pada penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan variabel, Utami (2019) menggunakan variabel asimetri informasi, proteksi *awig-awig*, moralitas dan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel pengendalian internal, integritas, dan proteksi *awig-awig*. Pengendalian internal dipilih karena pengendalian internal yang lemah serta badan pengawas yang tidak efektif dalam mengawasi sehingga terjadinya kecurangan. Integritas dipilih sebagai variabel *independen* karena integritas mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dan proteksi *awig-awig* dipilih sebagai variabel *independen* karena peluang resiko kecenderungan kecurangan akuntansi dapat ditekan dengan adanya proteksi *awig-awig* yang kuat dan baik. Sedangkan kecenderungan kecurangan akuntansi dipilih sebagai variabel *dependen* karena terungkapnya kasus kecurangan yang terjadi di LPD Kecamatan Penebel. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penggunaan landasan teori, penelitian sebelumnya menggunakan teori *fraud triangle* sedangkan pada penelitian ini menggunakan landasan teori teori *fraud triangle* dan teori atribusi. Perbedaan berikutnya yaitu pada subjek penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya memilih ketua dan karyawan yang mengerti akuntansi sedangkan pada penelitian ini memilih kepala LPD, bendahara/kasir dan badan pengawas.

Berdasarkan latar belakang diatas serta faktor-faktor yang mengakibatkan tindakan kecurangan yang dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, INTEGRITAS, DAN PROTEKSI AWIG-AWIG TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (STUDI PADA LPD KECAMATAN PNEBEL).**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi yaitu adanya kasus kecurangan LPD Sunantaya di Kecamatan Penebel, sehingga peneliti tertarik untuk menguji terkait dengan Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, dan Proteksi *Awig-awig* terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini tidak meneliti semua faktor yang mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Peneliti membatasi variabel yang akan diteliti pada variabel Pengendalian Internal, Integritas, dan Proteksi *Awig-awig*.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD Kecamatan Penebel ?
2. Apakah Integritas berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD Kecamatan Penebel ?
3. Apakah Proteksi Awig-awig berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD Kecamatan Penebel ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD Kecamatan Penebel.
2. Untuk mengetahui pengaruh Integritas terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD Kecamatan Penebel.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Proteksi Awig-awig terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada LPD Kecamatan Penebel.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan, serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya teori fraud triangle dan teori atribusi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

kecenderungan kecurangan akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Penebel

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Pengawas dan Manajemen LPD

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau pertimbangan bagi Badan Pengawas dan Manajemen LPD dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan dana nasabah agar lebih baik kedepannya.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan referensi pustaka dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, terutama mengenai kecurangan akuntansi dan faktor-faktor penyebabnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Penebel mengenai perkembangan LPD sehingga dapat ikut serta membangun ekonomi negara dan mencegah terjadinya kecurangan akuntansi.